

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adolf, Huala, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.
- Agustina, Rosa, et.al, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar, Pustaka Larasan, 2012.
- Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- Chomzah, Ali Achmad, , *Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I Pemberian Hak Atas Tanah Negara Seri Hukum Pertanahan II Sertipikat dan Permasalahannya*, Jakarta, Prestasi Pustaka, 2002.
- Effendi, Bachtiar, *Kumpulan Tulisan Tentang Hukum Tanah*, Bandung, Alumni, 2003.
- Harsono, Boedi, *Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2005.
- _____, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta, Penerbit Djambatan, cetakan kesepuluh, 2005.
- H.S, Salim, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.
- Mardiana, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mawardi, Irvan, *Paradigma Baru PTUN Respon Peradilan Administrasi Terhadap Demokratisasi*, Yogyakarta, Thafa Media, 2016.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 2008.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1990.
- _____, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000.
- Mulyadi, Kartini, dan Gunawan Widjaya, *Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2007.
- Parlindungan, A.P, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem Undang-Undang Pokok Agraria*, Bandung, Mandar Maju, 1994.

- Rahmadi, Takdir, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ruchiyat, Eddy, *Sistem Pendaftaran Tanah Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Bandung, Armico, 1989.
- Santoso, Urip, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana Pranada Media Group, 2010.
- _____, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Revka Putra Media, 2011.
- _____, *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Jakarta, Kencana, 2010.
- Satrio, J, *Hukum Perjanjian*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1992.
- Satyayudha, Nyoman, dkk, *Buku Ajar penyelesaian Sengketa Alternatif*, Denpasar, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Rajawali Press, 2010.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1990.
- Subekti, R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1995.
- Sumardjono, Maria SW, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2009.
- _____, *Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada, 2019.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada, 2006.
- Sutopo, Ariesto Hadi, *Terampil Mengolah Data Kualitatif*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010.
- Syarani Riduan, *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, Alumni, 1985.
- Tjandra, Riawan, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2005.
- _____, *Peradilan Tata Usaha Negara Mendorong Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Berwibawa*, Yogyakarta, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2009.
- _____, 2003.

Winarta, Frans Hendra, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012.

Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Zein, Ramli, *Hak Pengelolaan Dalam Sistem UUPA*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 1995.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079).

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6523).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5893).

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59).

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4221).

Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5804).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Pengelolaan dan Pendaftarannya.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 1998 tentang Pedoman Penetapan Uang Pemasukan Dalam Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

JURNAL

Buonsu, I Gede, Sagung Laksmi, Luh Putu Suryani, “Keputusan Fiktif Sebagai Dasar Pengajuan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Preferensi Hukum*, Vol. 2 No.1, Maret 2021.

Kurniawan, Triadi, “Pemberian Hak Guna Bangunan Di Atas Bagian Tanah Hak Pengelolaan”, *Keadilan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang*, Vol 18, No.1, Februari, 2020.

Safitri, Erna Dwi dan Nabitatus Sa’adah, “Penerapan Upaya Administratif Dalam Sengketa Tata Usaha Negara”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 3 No. 1, 2021.

Santoso Urip, “Hak Guna Bangunan Atas Hak Pengelolaan (Suatu Kajian Perolehan Hak dan Perpanjangan Jangka Waktu)”, *Jurnal Hukum Adil*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Desember 2011.

_____, “Eksistensi Hak Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional”. *Mimbar Hukum*, Vol. 24, Nomor 2, Juni 2012.

Silviana, Ana, “Pemanfaatan Tanah Di Atas Hak Pengelolaan Antara Regulasi dan Implementasi”, *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 1 No. 1 November 2017.

Sumardjono, Maria SW, “Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, *Kompas*, 2007.

Supratman, “Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Ilmu Hukum Acara Perdata*, Vol. 1, No. 6 (Agustus 2015).

Wynona, Agnes, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup”, *Jurnal Berqia Niti*, Vol. 2 No. 8, 2018.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 20/Pdt.G/2015/PN. MKd

Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 103/Pdt/2016/ PT.SMG

Putusan Mahkamah Agung Nomor 695 K/Pdt/2017

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 73/G/2017/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 138/B/2018/PT.TUN.SBY

Putusan Mahkamah Agung Nomor 112 K/TUN/2019

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 79/G/2020/PTUN.SMG

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 73/B/2021/PT.TUN.SBY

TESIS

Ivan, Yohanes, Penyelesaian Sengketa Perkawinan Berdasarkan Hukum Adat Pada Masyarakat Hukum Adat Dayak Pangkodan, *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2017.

Sari, Komang Ayu Sandhy Purnama, Penyelesaian Sengketa Terhadap Tanah Ayahan Desa Sebagai Jaminan Kredit Di Desa Tenganan Pegringsingan Karangasem

Bali, *Thesis*, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, 2018.

INTERNET

Badan Pertanahan Nasional, “Penanganan Kasus Pertanahan”, <http://www.bpn.go.id>.

Hidayat, Raja, *Bom Waktu Kasus Apartemen DI Jakarta : HGB Di Atas Tanah Negara*, Diakses melalui www.tirto.id

Satrio, J, *Pelaksanaan Suatu Perjanjian*, Diakses melalui <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a5c2fbdae8c4/pelaksanaan-suatu-perjanjian/>

LAIN-LAIN

Akta Jual Beli Nomor 55/K/JP/MTL/XII/1993.

Akta Jual Beli Nomor 135/2010.

Perjanjian Kerjasama Pembangunan Rumah Toko Di Bekas Terminal Lama Muntilan Nomor 974/335/11/1992 antara Pemerintah Kabupaten Magelang dengan PT Merbabu

Hasil wawancara dengan Bapak Darmawan Joko Susilo, S.H, selaku Kepala Subbidang Bantuan Hukum dan HAM Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Magelang, pada tanggal 24 Oktober 2021.

Hasil wawancara dengan Ibu Finka Muri Kumalasari, S.Sos., MM., selaku Kepala Subbidang Pengelolaan Aset Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Magelang pada tanggal 2 Maret 2022.

Hasil wawancara dengan Ibu Nia, Ibu Warni, Ibu Wahyuning, dan Bapak Eko Novianto, selaku pemegang HGB dan pengurus Paguyuban Plaza Muntilan, pada tanggal 25 Desember 2021.

Sertipikat Hak Pengelolaan Nomor 01/ Pucungrejo atas nama Pemerintah Kabupaten Magelang.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 229 atas nama PT. Merbabu.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 264.

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 241.

Surat Jawaban Atas Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Jangka Waktu Nomor 180/409/01.02/2020 tanggal 08 Juli 2020.

Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Tanggal 17 September 1998 Nomor 630.1.3433 tentang Agunan Sertipikat di Atas Tanah Hak Pengelolaan.